

# Menggagas Model Pengembangan Standarisasi Sistem Pendidikan Pesantren

Cahya Edi Setyawan  
STAI Masjid Syuhada Yogyakarta  
Cahya.edi24@gmail.com

## Abstract

Pesantren in the current era is a portrait of the movement and development of Islamic education. Pesantren is already a style of Islamic education. Image boarding now is not as ancient as the place that impressed traditional education, but schools are now renew their education systems. Many boarding schools grow up into semi-modern, semi modern like in Gontor. Even schools already teach science and teknologi like Darul ulum. Then automatically schools already have a quality standard that is ideal at this time. Through this article will explain about thinking dipesantren education standards.

**Keywords:** *Pesantren, Islamic Boarding School, Islamic Education, Education System. Standardisation of Islamic Education.*

## A. Pendahuluan

Pesantren<sup>1</sup> merupakan satu di antara lembaga pendidikan di lingkungan masyarakat yang diakui telah memiliki andil yang cukup besar di dalam pengembangan generasi muda bangsa ke arah pencapaian cita-cita pendidikan nasional tersebut. Bahkan, pesantren telah banyak melahirkan pemimpin bangsa di masa lalu, kini, dan (tetap diharapkan) juga di masa depan. Namun, adanya perubahan sosial yang begitu cepat sebagai akibat modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pesantren kini

---

<sup>1</sup> Pesantren atau pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Menurut para ahli, suatu lembaga dapat disebut pesantren bila memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: (1) ada kiayi, (2) ada pondok, (3) ada masjid, (4) ada santri, dan (5) ada pengajian kitab kuning. lihat Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Rosda Karya, 2001), p.191.

dianggap sebagai lembaga pendidikan yang tertinggal, susah diajak maju, tidak memiliki lulusan yang siap kerja dan tidak mampu bersaing ditingkat global. Hal ini dikarenakan kebanyakan sistem pendidikan pesantren dianggap masih sangat tradisional.

Mukti Ali, sebagai penggagas kurikulum keterampilan di pesantren, mengatakan: "Suatu kenyataan yang kita ketahui bersama bahwa selama ini tidak semua keluarga pesantren ingin menjadi ulama, atau tidak semuanya berbakat ulama'. Banyak di antara alumni pondok pesantren yang memilih bekerja di luar bidang agama tanpa memiliki keahlian yang mereka peroleh selama belajar di pondok pesantren, sehingga, kurikulum keterampilan perlu diberikan di pondok pesantren. Ini berarti akan meningkatkan peranan pondok pesantren dalam menunjang pembangunan, khususnya pembangunan di daerah pedesaan. Masuknya beberapa komponen baru itu supaya kurikulum pondok pesantren berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Masyarakat Indonesia kini sedang membangun dan akan terus membangun."<sup>2</sup>

Pernyataan Mukti Ali di atas, mengisyaratkan agar pesantren tidak hanya mengedepankan kepandaian otak (menghafal), dan terlalu menonjolkan keutamaan akhlak (tasawwuf), tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek keterampilan yang dapat dijadikan bekal hidup para santri kelak setelah kembali ke masyarakat. Dengan kata lain, seorang santri idealnya harus mampu menyeraskan antara otak (*head*), akhlak (*heart*), dan keterampilan tangan (*hand*). Sehingga, *output* pesantren (yang merupakan pendidikan nonformal) dapat dihargai setara dengan *output* pendidikan formal, sesuai standar nasional pendidikan yang berlaku.

Dengan demikian, posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional sebenarnya memiliki tempat dan posisi yang istimewa. Karena itu, sudah sepantasnya jika kalangan pesantren terus berupaya melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas pendidikan di pesantren. Maka, dalam perkembangannya perlu adanya sebuah perumusan tentang standarisasi sistem pendidikan pesantren. Makalah ini akan membahas standarisasi model pengembangan pendidikan pesantren.

---

<sup>2</sup> A. Mukti Ali, *Peranan Pondok Pesantren dalam Pembangunan* (Jakarta: PT. Paryu Barkah, 1974) hlm. 6, sebagaimana dikutip oleh Minhaji. *Inovasi Pendidikan dalam Perspektif Pesantren (studi tentang Pola Inovasi Sistem Pendidikan di Pondok Pesantren)*, Jurnal Lisan al-Hal Vol. 6 No. 1 Juni 2014. p. 161.

## B. Pengertian dan Tujuan Pendidikan Pesantren

Secara *etimology*, pesantren berasal dari kata “santri” dengan mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti tempat tinggal para santri. Istilah santri sendiri konon berasal dari bahasa Sanskerta, *shastrī* yang berarti kitab suci, agama dan pengetahuan. Ada pula yang mengatakan, santri berasal dari kata *cantrik* yang berarti para pembantu begawan atau resi dengan upah ilmu pengetahuan dari begawan atau resi tersebut. Di Indonesia (terutama di wilayah Jawa, Sunda, dan Madura) pesantren lebih dikenal dengan sebutan pondok yang berasal dari bahasa Arab *funduq* yang berarti hotel, asrama, rumah, dan tempat tinggal sederhana. Sedang di Aceh dikenal dengan istilah *dayah*, atau *rankang*, atau *menuasa*. Sedangkan di Minangkabau dikenal dengan sebutan *surau*.<sup>3</sup>

Secara *terminology*, pesantren dapat dimaknai dengan “sebuah lembaga pendidikan tradisional yang para siswanya disebut santri yang tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang disebut kyai, dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri.”<sup>4</sup> Pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara nonklasikal, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada para santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh Ulama Abad pertengahan, dan para santrinya biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut.<sup>5</sup>

Dari pengertian di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa suatu lembaga dapat disebut pesantren bila memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: (1) ada kyai, (2) ada pondok, (3) ada masjid, (4) ada santri, dan (5) ada pengajian kitab kuning.<sup>6</sup>

Adapun mengenai tujuan pendidikan pesantren, menurut Mastuhu (1994), adalah untuk menciptakan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia bermanfaat bagi masyarakat atau berkhikmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi *katwula* atau menjadi abdi

<sup>3</sup> Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), p. 5.

<sup>4</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. (Jakarta: LP3S, 1983), p. 18.

<sup>5</sup> Sudjono Prasodjo, *Profil Pesantren*, (Jakarta: LP3S, 1982), p. 6.

<sup>6</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Rosda Karya, 2001), p.191.

masyarakat yang mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia.

Selanjutnya, keberhasilan pendidikan pesantren tidak terlepas dari pandangan akan tingkat *religiusitas* dari lulusannya, sehingga penilaian seperti ini akan senantiasa melekat pada diri santri sebagai sosok yang dihasilkan oleh pesantren guna mengembangkan, menjaga dan melestarikan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam kehidupan keseharian. *Religiusitas* yang senantiasa melekat pada mutu lulusan pesantren merupakan suatu standar bagi masyarakat dalam mengukur keberhasilan program penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh pesantren.

Sementara, aspek lain yang dijadikan standar dalam mengukur keberhasilan program pendidikan yang dilaksanakan oleh pesantren yaitu akselerasi dalam menjawab kebutuhan perkembangan peradaban manusia masa sekarang dan masa mendatang yaitu meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan yang adaptif dalam menghadapi tuntutan yang semakin berkembang.

### C. Tipologi Pesantren dan Problem Mendasar Pendidikan Pesantren

Secara umum, pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, dengan cara nonklasikal, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada para santri berdasarkan kitab-kitab kuning, dan para santrinya biasanya tinggal di pondok (asrama) di dalam lingkungan pesantren tersebut. Namun, secara khusus, tiap pesantren memiliki ciri khusus yang bervariasi. Pola pendidikan pesantren dapat dibedakan berdasarkan kategori-kategori dari berbagai perspektif, antara lain: dari segi spesifikasi keilmuan yang diajarkan, dari segi kurikulum yang digunakan, dari segi tingkat kemajuan, dari segi keterbukaan terhadap perubahan, dan dari segi sistem pendidikannya.

Perbedaan pola pendidikan pesantren terjadi umumnya karena adanya perbedaan selera kyai, atau perbedaan keadaan sosial-budaya, dan/atau perbedaan sosio-geografis yang mengitarinya. Berikut ini beberapa pemikiran yang terkait dengan tipologi pesantren:

Kategori pondok pesantren berdasarkan spesifikasi keilmuan antara lain:

- 1) pondok pesantren alat (yakni, pesantren yang mengutamakan penguasaan gramatika bahasa Arab) seperti Pesantren Lirboyo Kediri; Pesantren Fiqh seperti Tebuireng, Tambak Beras Jombang;
- 2) pesantren qiro'ah Al-Qur'an, seperti pesantren Krapyak Jogjakarta; dan
- 3) pondok pesantren *tasawuf*, seperti pondok pesantren Jampes Kediri;

Kategori pesantren dari perspektif keterbukaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, sebagaimana disebutkan oleh Zamakhsari Dhofier, yaitu:

- 1) pondok pesantren *salafiy*, yakni pesantren yang tetap mengajarkan kitab-kitab klasik sebagai inti pendidikannya. Penerapannya sistem madrasah untuk memudahkan sistem sorogan yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenakan pengajaran pengetahuan umum.
- 2) pondok pesantren *khalafiy*, yakni pesantren yang telah memasukkan pelajaran-pelajaran umum dalam madrasah-madrasah yang dikembangkan atau membuka tipe-tipe sekolah umum di dalam lingkungan pondok pesantren.

Kategori pondok pesantren dari segi kelembagaannya yang dikaitkan dengan sistem pengajarannya, sebagaimana diungkap oleh Ahmad Qadri Aziziy, yaitu:

- 1) Pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan maupun yang juga memiliki sekolah umum;
- 2) Pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meski tidak menerapkan kurikulum nasional;
- 3) Pondok pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk madrasah diniyah;

- 4) Pondok pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian (majlis ta'lim); dan
- 5) Pondok pesantren untuk asrama anak-anak belajar sekolah umum dan mahasiswa.

Kategori pondok pesantren yang sedang populer di lingkungan perguruan tinggi saat ini adalah *Ma'had 'Aliy* (pondok pesantren tingkat tinggi), seperti *Ma'had 'Aliy* di pesantren Denanyar Jombang yang menekankan pada kitab-kitab standar terutama ushul fiqh. Kemudian Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) *Ma'had 'Aliy* di pesantren al-Hikam Malang. Dan bermunculan di beberapa PTAIN/PTAIS di seluruh Indonesia.

Dengan mencermati tipologi pesantren ini, dapat ditemukan problem-problem yang tengah dihadapi masing-masing pesantren dalam melakukan pengembangan sistem pendidikannya. Secara umum, beberapa problem yang tengah dihadapi pesantren dalam melakukan pengembangannya, yaitu:

1. *Image* pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan yang tradisional, tidak modern, informal, dan bahkan teropinikan sebagai lembaga yang melahirkan terorisme, telah mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk meninggalkan dunia pesantren. Hal tersebut merupakan sebuah tantangan yang harus dijawab sesegera mungkin oleh dunia pesantren dewasa ini.
2. Sarana dan prasarana penunjang yang terlihat masih kurang memadai. Bukan saja dari segi infrastruktur bangunan yang harus segera dibenahi, melainkan terdapat pula yang masih kekurangan ruangan pondok (asrama) sebagai tempat menetapnya santri. Selama ini, kehidupan pondok pesantren yang penuh kesederhanaan dan kebersahajaannya tampak masih memerlukan tingkat kesadaran dalam melaksanakan pola hidup yang bersih dan sehat yang didorong oleh penataan dan penyediaan sarana dan prasarana yang layak dan memadai.
3. Sumber daya manusia. Sekalipun sumber daya manusia dalam bidang keagamaan tidak dapat diragukan lagi, tetapi dalam rangka meningkatkan eksistensi dan peranan pondok pesantren dalam bidang kehidupan sosial masyarakat, diperlukan perhatian yang serius. Penyediaan dan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang manajemen kelembagaan, serta bidang-bidang yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat, mesti menjadi pertimbangan pesantren.

4. Aksesibilitas dan *networking*. Salah satu kebutuhan untuk pengembangan pesantren adalah penguasaan akses dan *networking* dunia pesantren masih terlihat lemah, terutama sekali pesantren-pesantren yang berada di daerah pelosok dan kecil. Ketimpangan antar pesantren besar dan pesantren kecil begitu terlihat dengan jelas.
5. Manajemen kelembagaan. Manajemen merupakan unsur penting dalam pengelolaan pesantren. Pada saat ini masih terlihat bahwa pondok pesantren dikelola secara tradisional apalagi dalam penguasaan informasi dan teknologi yang masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dalam proses pendokumentasian (data base) santri dan alumni pondok pesantren yang masih kurang terstruktur.
6. Kemandirian ekonomi kelembagaan. Kebutuhan keuangan selalu menjadi kendala dalam melakukan aktivitas pesantren, baik yang berkaitan dengan kebutuhan pengembangan pesantren maupun dalam proses aktivitas keseharian pesantren. Tidak sedikit proses pembangunan pesantren berjalan dalam waktu lama karena menunggu sumbangan atau donasi dari pihak luar, bahkan harus melakukan penggalangan dana di pinggir jalan.
7. Kurikulum yang berorientasi *life skills* santri dan masyarakat. Pesantren masih berkonsentrasi pada peningkatan wawasan dan pengalaman keagamaan santri dan masyarakat. Apabila melihat tantangan ke depan yang semakin berat, peningkatan kapasitas santri dan masyarakat tidak cukup.

#### **D. Output Ideal Pesantren Masa Kini**

Bertolak dari rumusan tujuan pendidikan pesantren sebagaimana telah disebutkan di atas, dan berangkat dari kenyataan tentang pentingnya aspek kurikulum yang berorientasi *life skills* bagi para santri yang *mondok* di pesantren, maka jelaslah bahwa pesantren di masa sekarang dituntut untuk berbenah, menata diri untuk melakukan perubahan guna menghadapi persaingan global. Namun, perubahan dan pembenahan yang dimaksud tidak boleh meninggalkan nilai-nilai positif pesantren yang justru menjadikannya *"ora iso ngaji"* (tidak pandai membaca al-Qur'an dan kitab kuning). Untuk merespon arus perubahan, pesantren harus tetap berpegang pada kaidah *"al-muhafadlatu 'ala al-qodimi alshalih wa al-akhdzu*

*bi al-jadidi al-ashlah*" (melestarikan khazanah lama yang masih relevan dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik).

Oleh karena itu, pesantren harus mempersiapkan santrinya memasuki dunia global, para santri perlu dibekali bukan saja hanya penguasaan ilmu-ilmu melalui kitab klasik (kitab kuning), tetapi pesantren sudah harus melakukan pembelajaran melalui sarana teknologi dan memperkenalkan mereka dengan teknologi, sehingga santri nantinya tidak gagap teknologi dengan kemajuan teknologi ketika berbaur di tengah kehidupan masyarakat luas.<sup>7</sup>

Sehingga, *output* pesantren masa kini, sebagaimana diisyaratkan oleh Mukti Ali, tidak hanya memiliki kepandaian otak (menghafal), dan terlalu menonjolkan keutamaan akhlak (*tasawwuf*), tetapi juga harus memiliki keterampilan hidup (*life skills*) yang dapat dijadikan bekal hidup para santri kelak setelah kembali ke masyarakat. Dengan kata lain, lulusan pesantren masa kini idealnya harus mampu menyasikan antara otak (*head*), akhlak (*heart*), dan keterampilan tangan (*hand*). Sehingga, *output* pesantren (yang merupakan pendidikan nonformal) dapat dihargai sejajar dengan *output* pendidikan formal, sesuai standar nasional pendidikan yang berlaku.

## E. Pengembangan Standarisasi Sistem Pendidikan Pesantren

Sudah tidak diragukan lagi bahwa pesantren memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan pendidikan. Apalagi dilihat secara historis, pesantren memiliki pengalaman yang luar biasa dalam membina dan mengembangkan masyarakat. Bahkan, pesantren mampu meningkatkan perannya secara mandiri dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat di sekelilingnya.<sup>8</sup>

Pembangunan manusia, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau masyarakat semata-mata, tetapi menjadi tanggung jawab semua komponen, termasuk dunia pesantren. Pesantren yang telah memiliki nilai historis dalam membina dan mengembangkan masyarakat, kualitasnya harus terus didorong dan dikembangkan.

---

<sup>7</sup> Minhaji, *Inovasi Pendidikan dalam.....*, p. 163-164.

<sup>8</sup> Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Amisisco, 1996), p. 13.



Sejak berlakunya UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan keagamaan diakui sebagai salah satu jenis pendidikan di samping pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi dan ketrampilan khusus. Bahkan, sejak terbitnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, *output* pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/ umum/ kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Namun, posisi pesantren, khususnya pesantren salaf yang semata menjalankan kurikulum ilmu keislaman yang belum diakui pemerintah, antara lain karena pesantren salaf lazimnya tidak menerapkan ketentuan pemberian ijazah kepada para santri yang telah menyelesaikan pendidikan. Sampai akhir tahun 1990-an masih ada lulusan pesantren, yang karena belum mendapatkan pengakuan pemerintah tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi negeri keagamaan seperti IAIN dan STAIN. Kendala lain dapat berupa tidak diakuiinya pendidikan mereka ketika mencari lapangan pekerjaan. Dengan adanya kendala-kendala tersebut, banyak dari lembaga pendidikan Islam pola pesantren ini mengubah pendidikannya ke dalam bentuk madrasah dan menerapkan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga lulusannya mendapatkan pengakuan baik dari pemerintah maupun dari sektor lain.<sup>9</sup>

Melihat fakta di atas, pada gilirannya banyak masyarakat yang lebih memilih untuk memasukkan putra-putrinya ke sekolah dengan alasan lulusan pesantren tidak dapat melanjutkan pendidikan atau tidak dapat langsung bekerja. Sikap ini ternyata merupakan tantangan paling berat bagi kelangsungan pesantren, khususnya bagi pesantren kecil. Sedang, pesantren-pesantren besar dapat bertahan, tetapi setelah pesantren membuka lembaga-lembaga pendidikan umum, yakni dengan menyelenggarakan SMP dan SMA/SMK. Musibah yang hampir sama menimpa pesantren kembali pada tahun 1970an ketika sekularisasi gencar memasuki seluruh aspek kehidupan manusia di Indonesia.

---

<sup>9</sup> Nurhayati Djasas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), p. 189-190.

Latar belakang timbulnya lembaga-lembaga pendidikan umum di pesantren seperti SD, SMP dan SMA akan menemukan paling tidak dua jawaban: pertama, sebagai upaya pesantren dalam melakukan adaptasi dengan perkembangan pendidikan nasional, atau oleh Mastuhu dikatakan karena dampak global dari pembangunan nasional serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kedua adalah karena kepentingan “menyelamatkan nyawa” pesantren dari kematian selama-lamanya. Kebutuhan adaptasi sebenarnya telah dirintis sejak mendirikan madrasah, yang memperlancar proses pembaharuan kelembagaan. Sedang upaya penyelamatan kehidupan pesantren merupakan tindakan yang strategis dan spontan. Kedua faktor ini saling mempengaruhi berdirinya lembaga-lembaga pendidikan umum sebagai pengembangan (pemantapan pembaharuan) institusi pesantren. Lembaga-lembaga pendidikan umum seperti SD, SMP dan SMA tersebut terus berkembang, bahkan semakin mendapat dukungan dari masyarakat santri yang memiliki keterikatan moral dengan pesantren. Mereka ingin agar putra-putrinya belajar ngaji di pesantren sekaligus dapat mengikuti pendidikan di SD, SMP dan SMA di dalamnya, lantaran cara demikian lebih memberikan jaminan keutuhan pribadi santri. Sebab di samping pengetahuan dan pengalaman ajaran agama tertanam dengan baik, santri juga dapat mengembangkan potensi intelektualnya melalui penerapan sistem pembelajaran yang modern.<sup>10</sup>

Akhirnya, tanpa banyak pertimbangan kebanyakan pesantren mengikuti sistem yang dikembangkan pemerintah secara keseluruhan. Maka beberapa pesantren cenderung mendirikan perguruan tinggi dengan meniru sistem perguruan tinggi nasional secara totalitas. Para pengamat melaporkan bahwa banyak pesantren besar seperti Tebuireng, Tambakberas, Rejoso, Gontor, dan Cipasung yang mendirikan perguruan tinggi dengan membuka fakultas-fakultas agama Islam seperti Ushuluddin, Syari’ah, Tarbiyah, Dakwah dan Adab, serta fakultas umum seperti Hukum, Ekonomi, Sosial Politik dan sebagainya. Di Jawa Barat juga banyak yang membuka fakultas, misalnya pesantren As-Syafi’iyyah dan Cipasung. Di luar Jawa, pesantren yang telah mendirikan perguruan tinggi adalah Pesantren Diyatul Islamiyyah di Seriguna Tanjung Lubuk Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan.

---

<sup>10</sup> Mujamil Qomar, *Pesantren dari ...*, p. 97-98.

## F. Standar pendidikan Islam

Menurut Ahmad Syar'i, standar pendidikan Islam – dalam konteks nasional setidaknya harus terdapat salah satu dari dua kriteria berikut:<sup>11</sup> Pertama, harus dilihat dari materi dan tujuannya apakah materi pendidikan yang dikembangkan merupakan kajian, telaahan, dan implementasi dari ajaran dan atau nilai-nilai Islam. Serta apakah tujuannya dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT? Pengertian kajian, telaahan, dan implementasi dari ajaran dan atau nilai-nilai Islam tidak dalam arti sempit seperti materi aqidah akhlak, fiqh, hukum Islam dan sejenisnya, namun lebih luas dari itu, seperti mengkaji atau membaca alam dengan segenap potensi dan kekayaannya sebagai wujud dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Demikian pula dengan tujuan akhirnya, apakah akan mendekatkan pemahaman manusia dan pendekatan dirinya kepada Tuhan atau sebaliknya.

Kedua, dilihat dari personil dan lembaga pengelolanya harus Islam. Karena banyak lembaga pendidikan non muslim, bahkan mungkin anti atau tidak simpati pada Islam justru mengelola dan mengembangkan lembaga pendidikan yang mengkaji ajaran Islam. Namun sekali lagi tujuannya justru hanya untuk keperluan pengembangan pengetahuan belaka, bahkan tidak mustahil dapat dijadikan wahana untuk menonjolkan Islam itu sendiri.

Dari penjelasan di atas dapat diuraikan bahwa standar pendidikan Islam harus memenuhi minimal empat standar berikut:

- 1) Standar bahan ajar yang memuat materi-materi bernuansa Islam
- 2) Standar kurikulum yang memiliki tujuan akhir pengabdian kepada Allah
- 3) Standar tenaga pendidik yang muslim
- 4) Standar lembaga pendidikan yang bercirikan Islam

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2008, standar pendidikan Islam baru diatur pada standar lulusan dan standar isi. Sedangkan untuk standar-standar yang lainnya masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 yang memuat 8 (delapan) komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan/SKL, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Pendidikan dan

---

<sup>11</sup> Ahmad Syar'i, *Filsafat Pendidikan Islam .....*, p. 127

Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan Pendidikan, dan (8) Standar Penilaian Pendidikan.

Mencermati fakta-fakta sosio-historis yang mengiringi perkembangan pendidikan pesantren, maka pengembangan standarisasi sistem pendidikan pesantren dapat dilakukan dengan bantuan pemerintah dengan mengacu pada UU dan PP yang berlaku, dan/atau dilakukan institusi pesantren sendiri secara sporadis dengan mengacu pada selera kyai, atau keadaan sosial-budaya, dan/atau sosio-geografis setempat, karena pesantren pada umumnya bersifat mandiri, tidak tergantung kepada pemerintah atau kekuasaan yang ada. Karena sifat mandiri itu, pesantren bisa memegang teguh kemurniannya sebagai lembaga pendidikan Islam. Jadi, tawaran tentang pengembangan sistem pendidikan di pondok pesantren bisa saja diambil dan diadopsi oleh pesantren atau bisa juga tidak.

## G. Kesimpulan

Setelah penulis mencermati pembahasan tentang pemikiran tentang pengembangan standarisasi sistem pendidikan pesantren dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama yang dipimpin oleh seorang kiai yang mengajarkan ilmu agama Islam kepada para santri baik yang mondok (*santri muqim*) maupun tidak mondok (*santri kalong*) di asrama dalam pesantren tersebut. Tujuan pendidikan pesantren secara umum adalah menciptakan kepribadian muslim yang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Namun, tujuan pendidikan tiap pesantren berbeda-beda sesuai misi dan visi serta tipologi pesantren yang diselenggarakan.
2. Tipologi pesantren adalah berbagai tipe pendidikan pesantren yang sebabkan oleh perbedaan selera kyai, atau perbedaan keadaan sosial-budaya, dan/atau perbedaan sosio-geografis yang mengitarinya, termasuk problem-problem mendasar yang dihadapi pesantren tersebut. Secara umum, problem-problem mendasar yang dihadapi pesantren antara lain: (1) dianggap sebagai lembaga tradisional, (2) tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai, (3) sumber daya manusia hanya tahu bidang keagamaan dan tidak ada/belum tersedia SDM untuk bidang kehidupan sosial masyarakat lain, (4).

Lemahnya aksesibilitas dan *networking*, (5) manajemen kelembagaan yang masih belum terstruktur, dan (6) kemandirian ekonomi kelembagaan belum tersedia dan terencana dengan baik, serta (7) belum memuat kurikulum yang berorientasi *life skills*.

3. *Output* atau Lulusan pesantren masa kini idealnya harus mampu menyerasikan antara otak (*head*), akhlak (*heart*), dan keterampilan tangan (*hand*). Sehingga, *output* pesantren (yang merupakan pendidikan nonformal) dapat dihargai sejajar dengan *output* pendidikan formal, sesuai standar nasional pendidikan yang berlaku.
4. Pengembangan standarisasi sistem pendidikan pesantren dapat dilakukan dengan mengikuti pemerintah dengan mengacu pada Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah yang berlaku, dan/atau dilakukan oleh institusi pesantren sendiri secara sporadis dengan mengacu pada selera kyai, atau keadaan sosial-budaya, dan/atau sosio-geografis setempat, karena pesantren pada umumnya bersifat mandiri, tidak tergantung kepada pemerintah atau kekuasaan yang ada.

## Daftar Pustaka

- A. Mukti Ali, *Peranan Pondok Pesantren dalam Pembangunan* (Jakarta: PT. Paryu Barkah, 1974).
- Ahmad Syar'i, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Rineka Cipta. 2010).
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Rosda Karya, 2001).
- Jamaluddin Malik, *Pemberdayaan Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005).
- Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Amisco, 1996)
- Minhaji. *Inovasi Pendidikan dalam Perspektif Pesantren (Studi tentang Pola Inovasi Sistem Pendidikan di Pondok Pesantren)*, Jurnal Lisan al-Hal Vol. 6 No. 1 Juni 2014.
- Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2002).

Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997) Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. (Jakarta: LP3S, 1983).

Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Sudjono Prasodjo. *Profil Pesantren*, (Jakarta: LP3S, 1982).